



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

ZONA INTEGRITAS

- Predikat yang diberikan kepada **instansi pemerintah** yang pimpinan dan jajarannya mempunyai **komitmen** untuk mewujudkan **WBK/WBBM** melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam **hal pencegahan korupsi** dan **peningkatan kualitas pelayanan publik**

ZONA INTEGRITAS

3



Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik

DASAR HUKUM PERMENPAN

PERMENPAN tentang ZI

Permen PANRB 52 / 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah

Permen PANRB 10 / 2019 Tentang perubahan atas Permen PANRB 52 / 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah

Permen PANRB 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM

Z
O
N
A

I
N
T
E
G
R
I
T
A
S

HAKIKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuhkan-kembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan K/L/Pemda



Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun **percontohan-percontohan** pada tingkat unit kerja K/L dan Pemda sebagai ZI Menuju WBK-WBBM

PERSYARATAN ZONA INTEGRITAS

6

SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Tingkat Instansi Pemerintah	Opini BPK minimal "WTP"	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predikat SAKIP minimal "B" 2. Indeks RB Minimal CC Untuk Pemda 3. Indeks RB Minimal B untuk Kementerian/lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predikat SAKIP minimal "BB" 2. Indeks RB Minimal B Untuk Pemda 3. Indeks RB Minimal BB untuk Kementerian/lembaga
	Level Maturitas SPIP Minimal Level 3	
Tingkat Unit Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dan instansinya 2. Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi 3. Presenter penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100 % 4. LHKASN dan LHKPN 100 % 	
	Sudah melakukan Pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun	Sudah melakukan Pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun
	Predikat SAKIP dari evaluasi Internal minimal "B"	Predikat SAKIP dari evaluasi Internal minimal "BB"

Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakup:

a. **Pencanangan ZI;** Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah atau pimpinan unit kerja bahwa instansi/unit kerja telah siap membangun Zona Integritas

b. **Penetapan unit kerja;**

Keputusan Walikota No 700/Kep.876-ItDa/2021 tanggal 9 November 2021; (Inspektorat Daerah Kota Bogor, RSUD, Bapenda, Dinas DukCapil, DPMPTSP, Kecamatan Bogor Barat)

C. PEMBANGUNAN

1. Perangkat Daerah melakukan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Tim Asesor ZI.
2. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.
3. Pembentukan Tim Asesor Zona Integritas (Anggota Tim Asesor berbeda orang nya dengan Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM)
4. Membuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
5. Perangkat Daerah menetapkan Agen Perubahan.
6. Perangkat Daerah membuat Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama yang mengacu kepada peta proses bisnis instansi.
7. Perangkat Daerah melakukan pemenuhan di 6 area perubahan baik di pemenuhan dan reform serta hasil berupa eviden sebagaimana penjelasan di Permen PANRB No 90 Tahun 2021

D. PEMANTAUAN

Selama unit kerja membangun Zona Integritas di Internalnya masing-masing, maka perlu dilakukan pendampingan dan pemantauan oleh Tim Penilai Internal (TPI). Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan ZI berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

PERMENPANRB 10/2019 VS PERMENPANRB 90/2021

10

PENILAIAN ZONA INTEGRITAS PermenPANRB 10/2019	
A. PROSES (PENGUNGKIT)	60,0
I. MANAJEMEN PERUBAHAN	8,0
1. Tim Kerja	1,0
2. Rencana Pembangunan Zona Integritas	2,0
3. Pemantauandan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	2,0
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	3,0
II. PENATAAN TATA LAKSANA	7,0
1. Prosedur operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama	2,0
2. E- Office	4,0
3. Keterbukaan Informasi Publik	1,0
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	10,0
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	0,5
2. Pola Mutasi Internal	1,0
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	2,5
4. Penetapan kinerja individu	4,0
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	1,5
6. Sistem Informasi Kepegawaian	0,5

PENILAIAN ZONA INTEGRITAS PermenPANRB 90/2021	
A. PROSES (PENGUNGKIT) PEMENUHAN	60,0 30,0
I. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,0
1. Penyusunan Tim Kerja	0,5
2. Rencana Pembangunan Zona Integritas	1,0
3. Pemantauandan Evaluasi Pembangunan	1,0
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1,5
II. PENATAAN TATA LAKSANA	3,5
1. Prosedur operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama	1,0
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,0
3. Keterbukaan Informasi Publik	0,5
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	5,0
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	0,25
2. Pola Mutasi Internal	0,5
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	2,0
4. Penetapan kinerja individu	2,0
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	0,75
6. Sistem Informasi Kepegawaian	0,25

IV. Penguatan Akuntabilitas	10,0
1. Keterlibatan pimpinan	5,0
2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja	5,0
V. Penguatan Pengawasan	15,0
1. Pengendalian Gratifikasi	3,0
2. Penerapan SPIP	3,0
3. Pengaduan Masyarakat	3,0
4. Wistle Blowing System	3,0
5. Penanganan Benturan Kepentingan	3,0
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,0
1. Standar Pelayanan	3,0
2. Budaya Pelayanan Prima	4,0
3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	3,0
HASIL	40,0
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN	20,0
1. Nilai survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	15,0
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang ditindaklanjuti	5,0
II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	20,0
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	20,0

IV. Penguatan Akuntabilitas	5,0
1. Keterlibatan pimpinan	2,5
2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja	2,5
V. Penguatan Pengawasan	7,5
1. Pengendalian Gratifikasi	1,5
2. Penerapan SPIP	1,5
3. Pengaduan Masyarakat	1,5
4. Wistle Blowing System	1,5
5. Penanganan Benturan Kepentingan	1,5
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,0
1. Standar Pelayanan	1,0
2. Budaya Pelayanan Prima	1,0
3. Pengelolaan Pengaduan	1,0
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	1,0
5. Pemanfaatan Teknologi Inform	1,0
REFORM	30,0
I. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,0
1. Komitmen Dalam Perubahan	2,0
2. Komitmen Pimpinan	1,0
3. Membangun Budaya Kerja	1,0
II. PENATAAN TATA LAKSANA	3,5
1. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi	0,5
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,0
3. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,0

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,0
1. Kinerja Individu	2,0
2. Assesment Pegawai	1,5
3. Pelanggaran Disiplin Pegawai	1,5
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,0
1. Meningkatnya Capaian Kinerja Unit Kerja	2,0
2. Pemberian Reward and Punishment	1,5
3. Kerangka Logis Kinerja	1,5
V. PENGUATAN PENGAWASAN	7,5
1. Mekanisme Pengendalian	2,5
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat	3,0
3. Penyampaian Laporan Harta kekayaan	2,0
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,0
1. Upaya dan atau Inovasi Pelayanan Publik	2,5
2. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan	2,5
HASIL	40,0
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,5
1. Nilai survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17,5
2. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,0
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,5
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17,5
TOTAL NILAI A + B (PENGUNGKIT + HASIL)	100,0



TERIMA KASIH

Sukses Zona Integritas WBK-WBBM